

No. 1

5 Juni

1965

Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat
Warta Resmi Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

Tanggal : 20 Mei 1965

Nomor : 84/B.I/Pem/Sk/65.

Tentang : Penunjukan Kota Kembang sebagai tempat kedudukan sementara
Inspektorat Pemerintahan Wilayah V.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Berkehendak :
melaksanakan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal
20 Mei 1965 No. 83/B-I/Pem/Sk/65 perihal Inspektorat Pemerintahan;

Menimbang :
bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
tempat kedudukan Inspektorat Pemerintahan Wilayah V, yakni Kota Garut,
memerlukan waktu;

Mengingat :
a. Undang-undang No. 1 tahun 1957;
b. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 (disempurnakan);
c. Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 21 Mei
1960 No. V/PD;

MEMUTUSKAN :

Pertama :
Menunjuk kota Bandung sebagai tempat kedudukan sementara
Inspektorat Pemerintahan Wilayah V, sampai selesainya persiapan,
untuk menjadikan kota Garut sebagai tempat kedudukan Inspektorat
Pemerintahan Wilayah

Kedua :
Menunjuk Saudara R. Abas Sumintapura sebagai acton-officer untuk
melaksanakan segala persiapan termaksud diatas dengan dibantu oleh
:
a. Kepala-Kepala Biro II Keuangan Biro III Kepegawaian Bagian Umum
dan Bagian Kesejahteraan pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah
Jawa Barat;

b. Kepala Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut;

d. Lain-lain Instansi yang diperlukan; dengan catatan, bahwa dalam
waktu 3 bulan segala persiapan termaksud harus sudah selesai,
sehingga peresmian kota Garut sebagai tempat kedudukan
Inspektorat Pemerintahan Wilayah V dapat dilakukan pada tanggal

17 Agustus 1965.

Ketiga

Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

GOVERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI

BRIG.JEN. T.N.I

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sapta Tunggal DT. I Jawa Barat di Bandung.
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta, dan Bandung,
4. Kantor Urusan Perjalanan di Jakarta dan Bandung,
5. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Barat,
6. Semua Kepala Biro/Inspektorat/Bagian/Urusan pada Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Barat,
7. Semua Kepala Jawatan/Kantor Daerah Tingkat I Jawa Barat.